

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia mengandung dimensi historis yang cukup panjang. Salah satu hal yang merupakan pemicu utama lahirnya BUMN adalah upaya nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap sejumlah aset asing. Hal ini tidak berlebihan sebab sejumlah besar negara di dunia pada saat ini cenderung untuk mengembangkan budaya swastanisasi dan sebaliknya membatasi peran negara dalam perekonomian.

Meskipun demikian, upaya membandingkan perkembangan BUMN di berbagai negara tidaklah cukup obyektif jika tidak didampingi pengetahuan yang memadai terhadap kondisi historis BUMN di masing-masing negara tersebut. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka penelitian ini mencoba mengangkat perkembangan BUMN di Indonesia khususnya perusahaan perbankan. Jika dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada tahun 2005 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka tampak jumlah aset BUMN yang mencapai angka 1.311 triliun. Angka ini terbilang amat besar dan mampu menutup kurang lebih 98 % dari seluruh kewajiban pemerintah Indonesia pada tahun itu yang nominalnya mencapai angka 1.324 triliun (Sugiharto dan Sukardi, 2006:13). Dari sudut ini, tidaklah

mencengangkan apabila timbul pemikiran dari sejumlah kalangan untuk menjual seluruh BUMN sebagai upaya untuk memangkas hutang negara. Namun pemikiran seperti ini bukanlah alternatif satu-satunya. Upaya memacu pengembangan BUMN dalam mencetak profit juga dapat menjadi solusi yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pembangunan perekonomian jangka panjang, ketimbang menjualnya secara tergesa-gesa terlebih ketika kondisi sejumlah BUMN berada pada posisi nilai tawar masih rendah. Fakta juga menunjukkan bahwa penyertaan modal pemerintah pada BUMN juga cukup besar. Menurut data Bank Indonesia per 31 Desember 2005 dalam Sugiharto dan Sukardi (2006:14), nilai penyertaan modal pemerintah pada BUMN mencapai angka 393 triliun atau sekitar 60,4% dari seluruh jumlah investasi jangka panjang pemerintah yang besarnya mencapai 650,5 triliun pada periode itu. Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat bahwa kedudukan BUMN cukup strategis dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu pula maka isu pengelolaan BUMN telah berkembang menjadi salah satu wacana yang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Besar harapan bahwa BUMN dapat berkiprah dengan baik dan bukan sebaliknya menjadi beban negara.

Sebagai warisan Pemerintahan Orde Baru kinerja sebagian besar BUMN cukup rendah, bahkan terdapat beberapa BUMN yang terus merugi hingga beberapa tahun. Keadaan tersebut tentu menjadi permasalahan yang harus dipecahkan dengan segera, karena BUMN yang merugi akan menjadi beban bagi

Negara. Dengan jumlah asset yang cukup besar, BUMN seharusnya dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Negara dan dapat membantu meringankan pembiayaan belanja Negara, atau minimal dapat memenuhi pembayaran utang luar negeri yang sudah menumpuk.

Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata permasalahan rendahnya kinerja sejumlah BUMN disebabkan pengelolaan yang tidak transparan. Sebagai warisan Orde Baru, BUMN telah terlanjur dikelola secara tertutup sehingga menyebabkan tumbuh subur kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Pengelolaan yang demikian menyebabkan BUMN dibebani dengan biaya tinggi, baik untuk biaya investasi maupun untuk biaya operasional. Penggunaan biaya yang tidak efisien dan tidak efektif tentu akan berakibat pada rendahnya kinerja perusahaan.

Kinerja keuangan merupakan ukuran hasil yang dicapai atas pendayagunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan, yang dapat diketahui dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Salah satu alat analisis yang umum digunakan adalah analisis rasio, yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas.

Investor pada umumnya akan cukup terfokus pada ukuran kinerja keuangan yang dapat menggambarkan kemampuan (profitabilitas), karena laba merupakan hasil usaha yang tersedia bagi investor dan menunjukkan penambahan nilai perusahaan. Terdapat tiga jenis rasio profitabilitas yang utama,

yaitu *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE) dan *net profit margin* (NPM). ROA merupakan perbandingan laba bersih dengan total asset, ROE merupakan perbandingan laba bersih dengan ekuitas, sedangkan NPM merupakan perbandingan laba bersih dengan atau pendapatan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan Pranata (2007) menyatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dari ROE, NPM dan Tobin's Q. Lalu penelitian yang dilakukan Frediawan (2008) menunjukkan penerapan prinsip GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian penelitian Wardani (2008) menunjukkan bahwa *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja operasional perusahaan yang diukur dari ROE nya tetapi berpengaruh positif terhadap Tobin's Q sebagai nilai kinerja perusahaan. Sedangkan penelitian dari Paradita (2009) menunjukkan penerapan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dari ROI, ROE dan NPM. Lalu Hardikasari (2011) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak signifikan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan tetapi ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan tidak signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Terlihat bahwa kedua penelitian tersebut di atas menghasilkan kesimpulan yang berbeda atas pengaruh penerapan GCG pada perusahaan yang

berbeda. Oleh karena itu penulis ingin melanjutkan penelitian mengenai penerapan GCG pada perusahaan BUMN yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah, dan mengangkatnya dalam bentuk tulisan dengan judul: **“Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan pada BUMN yang Terdaftar di BEI”**

1.2. Identifikasi Masalah

Pengelolaan perusahaan yang tidak transparan membuka kesempatan yang cukup luas untuk tumbuh subur kolusi, korupsi dan nepotisme. Pengelolaan pola KKN akan menimbulkan biaya tinggi sebagai akibat dari penggunaan biaya yang tidak efektif dan tidak efisien, dan berakibat pada rendahnya kinerja keuangan. Dengan demikian identifikasi masalah penelitian adalah:

1. Apakah ada pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN ?
2. Apakah penerapan strategi *good corporate governance* dapat menentukan kesuksesan suatu perusahaan BUMN ?
3. Bagaimana pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN yang diukur dari ROA ?

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk memusatkan penelitian pada pokok permasalahan diatas, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan-perusahaan

BUMN yang menerapkan *good corporate governance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008, 2009, dan 2010. Kinerja keuangan perusahaan BUMN dapat diukur dengan berbagai variabel, namun demikian dalam penelitian ini kinerja keuangan yang diukur perusahaan BUMN yang digunakan, diukur dari: *Return on Assets* (ROA).

1.4. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan judul penelitian maka yang menjadi pokok permasalahan adalah: Apakah penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dari *return on assets* ?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti mengenai apakah penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dari ROA perusahaan BUMN yang menerapkan *good corporate governance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008, 2009, dan 2010.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi perusahaan dan dapat dijadikan bahan

pertimbangan dalam hal perbaikan kinerja keuangan perusahaan penerapan *Good Corporate Governance*.

2. Bagi Penulis

Menambah dan memperdalam wawasan pengetahuan penulis dalam menganalisis pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan.

3. Bagi Peneliti Lain

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pembandingan, bahan pendukung ataupun sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan bidang ini serta dapat memberikan manfaat-manfaat yang diperlukan.